

Volume 6. Nomor 2 Oktober 2016

DINAMIKA GOVERNANCE

Merupakan terbitan berkala enam bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan dibidang Ilmu Administrasi Negara, berkaitan dengan Dinamika Governance; untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif dan efisien.

Penanggung Jawab

Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

Penyunting/ Editor

Dr. Diana Hertati. M.Si
Dr. Agus Widiyarta. M.Si

Redaktur

Tukiman. S.Sos. M.Si

Desain Grafis

Dr. Lukman Arif. M.Si

Sekretariat

Dra. Sri Wibawani. M.Si
Dra. Susi Hardjati. M.Ap

Alamat Redaksi

Prodi Ilmu Administrasi Negara –FISIP
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE

Volume 6 Nomor 2 Oktober 2016

DAFTAR ISI

1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI KONSUMEN CERDAS DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.
Ary Setyo Wicaksono dan Sri Wibawani.....111
2. PERAN PUSKESMAS MEDOKAN AYU KOTA SURABAYA DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
Ika Ayu Utami dan Ertien Rining N.....127
3. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA)
Lucy Alif Pravitasari Dan Lukman Arif.....139
4. IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH (STUDI DI BANK SAMPAH “SALING ASIH” DESA LARANGAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO)
Teresia Retno Aryanti dan Tukiman.....147
5. PENGGUNAAN PROGRAM SSW (PERIZINAN ONLINE) SEBAGAI UPAYA UNTUK MENEKAN KOLUSI, NEPOTISME, DAN KORUPSI DALAM PROSES PERIZINAN DI KOTA SURABAYA
Agus Widiyarta, Catur Suratnoaji, Sumardjijati.....161
6. PENGARUH DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PD BPR BANK DAERAHLAMONGAN
Agrinata Thresna Zanuvar Attabik dan Pudjoadi.....172
7. KUALITAS PELAYANAN PERUM DAMRI PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDY KASUS TRANSPORTASI PADA BUS TRANS SIDOARJO)
Dewangga Putra Pratama dan Agus Widiyarta.....182
8. KUALITAS LAYANAN DAN PERATURAN PAJAK DAERAH TERHADAP TINGKAT KEOPUAN SERTA SIKAP PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Rusdi Hidayat Nugroho.....191
9. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
Indah Prabawati, Meirinawati.....203

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA)

Lucy Alif Pravitasari Dan Lukman Arif

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jawa Timur
Lucyalief@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan jumlah kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya menjadi suatu upaya pembenahan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam upaya tersebut terdapat kendala dimana kurangnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan mengidentifikasi dan untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kecamatan Semampir Kota Surabaya).

Tujuan Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah objek pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Semampir yang terdata di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur wilayah Surabaya Utara. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Simpel Random Sampling*. Jumlah sampel ditentukan 350 responden wajib pajak kendaraan bermotor. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode angket (kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *Koefisien Spearman Rank*.

Hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh koefisien korelasi variabel X_1 sebesar 0,69 yang berarti tingkat hubungan tinggi. Koefisien korelasi variabel X_2 sebesar 0,60 yang berarti tingkat hubungan sedang dan koefisien korelasi variabel X_3 sebesar 0,38 yang berarti tingkat hubungan rendah. Variabel X_1 , X_2 , X_3 telah dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan yakni faktor kesadaran (47,61%), faktor pelayanan fiskus (36%) dan faktor sanksi denda (14,44%).

Kata kunci : Kesadaran wajib pajak, Pelayanan fiskus, Sanksi denda

ABSTRACT

The increase in the number of vehicles continues to grow each year into an effort to revamp the local revenues, but there are obstacles in this effort where the lack of tax compliance. This study aims to determine the factors that influence taxpayer compliance and to identify and to determine the effect of each factor on the Motor Vehicle Tax Payments (Studies in the District Semampir Surabaya).

Objective In this study population used is the object motor vehicle tax in the District Semampir recorded in the Revenue Office of Technical Implementation Unit of East Java Province North Surabaya region. Sampling was done by Simple

Random Sampling method. The total sample of 350 respondents taxpayer specified motor vehicle. Primary data collection method used is by questionnaire (questionnaire). Data analysis techniques used in this study is the coefficient of Spearman Rank analysis techniques.

The results of the analysis conducted X_1 variable correlation coefficient of 0.69, which means a high degree of correlation. The correlation coefficient of 0.60 X_2 , which means the level of relationship and correlation coefficients were variable X_3 is 0.38, which means a low level of relationship. Variable X_1 , X_2 , X_3 has been revealed to have a significant effect on tax compliance. Factors that affect the compliance of the awareness factor (47.61%), service factor the tax authorities (36%) and financial penalties factor (14.44%).

Keywords: Awareness of taxpayers, tax authorities Services, Penalty charges

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan yang dapat secara bebas digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah, maka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap sangat penting. Pendapatan daerah masih merupakan alternatif utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur khususnya Kota Surabaya.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 disebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Public Investment. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan

sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai suatu pembangunan daerah.

Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas dan unit pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang begitu pesat mengakibatkan arus pertumbuhan kendaraan bermotor tersebut menjadi cepat pula. Hal ini menunjukkan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu jenis pajak daerah yang memberikan penerimaan dan kontribusi yang cukup besar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

Dimana masyarakat mempunyai andil yang cukup besar dalam pengisian kas negara, sebab tanpa adanya peran serta dari masyarakat maka pelaksana pemerintahan di sektor pajak tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu sumber dana pemerintah. Oleh karena itu, penerimaan pajak harus terus ditingkatkan termasuk Pajak Kendaraan Bermotor.

Di wilayah Surabaya Utara, pajak kendaraan bermotor juga merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan penerimaan dan kontribusi yang cukup besar. Namun, hal ini tidak diimbangi oleh kepatuhan para wajib pajak di daerah Surabaya Utara dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel yang menerangkan mengenai target dan tunggakan pajak kendaraan bermotor di bawah ini :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih banyaknya objek tunggakan pajak kendaraan bermotor pada wilayah Kecamatan Semampir yang masih tinggi tingkat piutang atau tunggakan pajaknya dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Untuk melengkapi data sekunder dalam tabel tersebut, peneliti mendapatkan data primer yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur UPTD Surabaya Utara, Gito Sampurno, S. Sos. Sebagai berikut:

“Data tersebut memang benar, karena dalam lima tahun terakhir kecamatan yang paling tinggi tunggakan pajaknya itu Kecamatan Semampir, entah kenapa susah sekali untuk mencapai target yang sudah ditentukan dari dinas“. (wawancara; tanggal 9 Februari 2016).

Dari data skunder dan data primer hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Surabaya Utara dari beberapa kecamatan tersebut masih ditemui permasalahan dalam upaya terpenuhinya piutang atau tunggakan pajak belum memberikan hasil

maksimal. Lokasi yang dipilih adalah ilayyah kecamatan Semampir dengan data tunggakan pajak terbanyak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul “Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah kerja UPTD Surabaya Utara (Studi di Kecamatan Semampir Kota Surabaya)”

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi faktor – faktor apakah yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kecamatan Semampir Kota Surabaya).
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing faktor tersebut dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kecamatan Semampir Kota Surabaya).
3. **TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri. Menurut Soemitro dalam buku Herry (2010 : 7), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Andriani dalam buku Herry (2010 : 7) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat

ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

adi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan secara langsung

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Deviano dan Rahayu (2006:110), terdapat dua macam kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantif* memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga mengikuti kepatuhan formal.

Pengukuran kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib dari kepatuhan wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menyetorkan pajak kendaraan, tepat waktu dan tidak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan dalam pembayaran pajak terhutang atau tunggakan.

Kesadaran wajib pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan

semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Muliari dan Ery, 2011).

Indikator kesadaran wajib pajak antara lain:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Pelayanan fiskus

Pelayanan Fiskus adalah cara melayani petugas pajak. Tingkat keberhasilan penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh *tax payer* juga dipengaruhi oleh *tax policy*, *tax administration* dan *tax law* (A. Tony Prastiantono, 1994).

Indikator pelayanan fiskus yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah :

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak
2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
4. Kewajiban melaksanakan putusan.

Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009 : 47).

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar

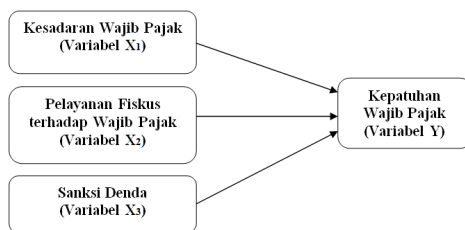
peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Indikator sanksi denda antara lain:

1. Sanksi Administrasi.
2. Sanksi Pidana.

Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir Penelitian



Hipotesis Penelitian

1. Kesadaran Wajib Pajak (X_1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Pelayanan Fiskus terhadap Wajib Pajak (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Sanksi Denda (X_3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan asosiatif/korelatif, karena dalam penelitian ini menggunakan data yang berupa angka.

Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Penarikan sampel pada penelitian adalah wajib pajak sebanyak adalah 350 responden.

Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Simple random sampling*, dimana sampel diambil dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata wajib pajak yang terdaftar pada kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil kuesioner yang ditujukan kepada wajib pajak yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Provisi Jawa Timur UPT Surabaya Utara pada kecamatan Semampir.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan kuisisioner atau angket yang disebarakan kepada wajib pajak yang terdaftar.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi Spearman Rank. Untuk menguji kuesioner yang akan disebarakan kepada wajib pajak digunakan uji validitas dan uji determinasi. Serta uji hipotesis untuk menguji hubungan dan kecocokan antar variabel yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Dari tingkat pendidikan hampir 50% responden hanya pendidikan SD hingga SLTA, hal ini memberikan indikasi bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Mengingat dengan memiliki pendidikan yang lebih tinggi, maka akan mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dari jenis pekerjaan karyawan swasta yakni sebanyak 113 orang atau sebesar 32,3 %. Sedangkan urutan responden yang memiliki kendaraan berupa sepeda motor yaitu sebesar 674 buah (78.00%), pada urutan kedua berupa mobil penumpang sebanyak 152 buah (17.60%). Dan juga pada penyebaran kuisioner ini dapat dilihat bahwa mayoritas responden masih pada usia produktif diantaranya 25 – 35 tahun yakni sebanyak 137 orang atau sebesar 39,20 %. Dari sekian banyak responden mayoritas mereka berasal dari suku madura.

Uji Reliabilitas

Untuk mengukur konsistensi interval penggunaan *Interpretasi Koefisien Korelasi* diketahui bahwa semua variable diperoleh rata-rata nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6, maka secara keseluruhan variabel dikatakan reliabel.

Uji T

Uji T Untuk mengukur apakah variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dalam hal ini menggunakan taraf signifikan 95% atau $\alpha = 5\%$ (0,05).

Pengujian Hipotesis

Dari analisis dan pengujian hipotesis variabel X_1 , X_2 , X_3 dengan variabel Y diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pada variabel X_1 yaitu kesadaran wajib pajak dengan variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak, diperoleh koefisien korelasi positif yaitu 0,69. Sedangkan uji hipotesisnya diperoleh t_{hitung} 8,67 dan t_{tabel} 1,98861 ($t_{hitung} > t_{tabel}$). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel X_1 yaitu kesadaran wajib pajak dengan variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang tinggi dan signifikan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu kesadaran di Kecamatan Semampir Kota Surabaya juga memiliki pengaruh 47,61% terhadap kepatuhan wajib pajak dan sisanya 52,39% dipengaruhi oleh faktor pelayanan fiskus, faktor denda dan faktor lainnya.

2. Pada variabel X_2 yaitu pelayanan fiskus dengan variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak, diperoleh koefisien korelasi positif yaitu 0,60. Sedangkan uji hipotesisnya diperoleh t_{hitung} 7,56 dan t_{tabel} 1,983495 ($t_{hitung} > t_{tabel}$). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel X_2 yaitu pelayanan fiskus dengan variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang sedang dan signifikan antara pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu pelayanan fiskus yang diberikan oleh UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara juga memiliki pengaruh 36% terhadap kepatuhan

wajib pajak dan sisanya 64% dipengaruhi oleh faktor kesadaran, faktor sanksi denda dan faktor lainnya.

3. Pada variabel X_3 yaitu sanksi denda dengan variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak, diperoleh koefisien korelasi positif yaitu 0,38. Sedangkan uji hipotesisnya diperoleh t_{hitung} 5,21 dan t_{tabel} 1,974902 ($t_{hitung} > t_{tabel}$). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel X_2 yaitu sanksi denda dengan variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang rendah dan signifikan antara sanksi denda dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu sanksi denda di Kecamatan Semampir Kota Surabaya juga memiliki pengaruh 14,44% terhadap kepatuhan wajib pajak dan sisanya 85,56% dipengaruhi oleh faktor kesadaran, faktor pelayanan fiskus dan faktor lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan ke 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Penapatan Provinsi Jawa Timur menurut urutan nilai tertinggi sampai nilai terendah, yaitu :

1. Variabel X_1 yaitu kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh sebesar 47,61% terhadap kepatuhan wajib pajak dan terdapat tingkat hubungan yang tinggi antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, berdasarkan uji hipotesis terdapat hubungan yang

signifikan antara variabel X_1 dan variabel Y .

2. Variabel X_2 yaitu pelayanan fiskus memiliki pengaruh sebesar 36% terhadap kepatuhan wajib pajak dan terdapat tingkat hubungan yang sedang antara pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, berdasarkan uji hipotesis terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X_2 dan variabel Y .

3. Variabel X_3 yaitu sanksi denda memiliki pengaruh sebesar 14,44% terhadap kepatuhan wajib pajak dan terdapat tingkat hubungan yang rendah antara sanksi denda dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, berdasarkan uji hipotesis terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X_3 dan variabel Y .

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Karena kesadaran merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi mengenai pentingnya pajak serta tata cara membayar pajak di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

2. Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni pelayanan fiskus. Maka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara, fiskus sebaiknya bersikap lebih sopan dan ramah dalam melayani wajib pajak. Selain itu, fiskus juga diharapkan tidak

memberikan pelayanan yang berberlit-belit kepada wajib pajak serta dapat memberikan informasi yang jelas sesuai dengan peraturan yang ada terhadap wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Nugroho. 2006. ”Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)”. *Tesis* Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Ajzen, Icek. 2002. *Constructing a TBP Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*. September (Revised January, 2006).

Amanda R. Siswanto Putri, I Ketut Jati, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar*: Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana (UNUD), Bali.

Desty Ardianti, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota)”.

Hariandja, Marihot Tua Effendi. 2005. *Manajemen Sumber*

Daya Manusia. Jakarta : Grasindo

Hasibuan, Malayu S.P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Mardiasmo, Prof. Dr. 2009, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.

Pancawati Hardiningsih , Nopember 2011, Vol. 3, No. 1 “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. Program Studi Akuntansi Universitas Stiku Bank Dinamika Keuangan dan Perbankan.

Siahaan P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sudjana. 2005. *Metode Statistika*. Bandung : Tarsito.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(2).

Peraturan Pemerintah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 22 tahun 2009 pasal 47